

Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

Maria Gayatri

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, Indonesia

e-mail: maria.gayatri.bkkbn@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah musuh bersama yang berdampak kerugian negara melalui terhambatnya proses pembangunan, meningkatnya ketimpangan sosial, melemahnya kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Peran pemimpin yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan telaah literatur. Kepemimpinan Pancasila berperan penting dalam mengelola kebhinekaan dengan baik serta mempertahankan karakter bangsa dalam melaksanakan proses pembangunan di segala bidang yang dilandasi integritas. Implementasi kepemimpinan Pancasila dalam bentuk budaya antikorupsi mampu mendukung penyelenggaraan negara yang bersih demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat, tanggung jawab moral yang besar serta dari hati nuraninya terus melakukan upaya yang menumbuhkan sikap anti korupsi dan memberi keteladanan yang baik dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Kepemimpinan, Korupsi, Pancasila

Abstract

Corruption is a public enemy that has destructive effect to the wealth of the nation by limiting economic development, increasing inequality, weakening trusts and managing inefficient allocation of resources. The implementation of leadership values in the Pancasila paradigm is needed to ensure Good Corporate Governance. This study aims to analyze the role of Pancasila leadership in preventing corruption in Indonesia. This research is a qualitative research using a literature review. Pancasila leadership plays an important role in managing diversity and maintaining national character in carrying out the development process in all fields based on integrity. The implementation of Pancasila leadership in the form of an anti-corruption culture is able to increase accountability, transparency based upon social justice. Implementing anti-corruption requires leaders as role models who have strong commitment and moral responsibility.

Keywords : Leadership, Corruption, Pancasila

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah menyebabkan pengaruh pada pergeseran nilai-nilai sosial, budaya dan moral masyarakat yang dapat berdampak pada nilai karakter budaya bangsa. Falsafah hidup bangsa dalam nilai-nilai Pancasila menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan dalam menghadapi fenomena globalisasi. Pancasila mampu memperkuat budaya asli Indonesia yang beragam untuk tetap bersatu dan bergotong royong dalam bertindak dan berperilaku. Globalisasi meleburkan batas antar negara. Dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sangat diperlukan Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai Pancasila seperti spiritual, humanisasi, nasionalis, demokratis dan keadilan sosial (social justice).

Permasalahan yang terjadi di Indonesia, beberapa pejabat negara terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). OTT ini sering dikaitkan dengan lemahnya akuntabilitas, transparansi dan integritas pejabat negara. Meluasnya praktik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara seperti menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dampak ekonomi pada proses pembangunan hingga meningkatnya kemiskinan (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat (termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang dan jabatan) untuk kepentingan pribadi (Kartono, 2003).

Ditetapkannya pejabat baik pada level Pemerintah Pusat maupun Daerah sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana terkait korupsi memberikan pengaruh negatif pada implementasi reformasi birokrasi dan berdampak pada kerugian negara. Reformasi birokrasi diharapkan bisa menjadi perubahan birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu bersih, birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani masyarakat serta birokrasi yang akuntabel (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008). Good Corporate Governance ini menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran/fairness (Herawaty & Hernando, 2020; Kurniawan & Izzaty, 2019; Sofia, 2016). Implementasi Good Corporate Governance mengutamakan asas akuntabilitas yang berorientasi pada tanggung jawab dalam pelaksanaan kinerja serta transparansi dalam pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun swasta (Rowa & Arthana, 2019).

Perilaku korupsi dapat berdampak buruk pada kerugian sumber daya negara, inefisiensi anggaran, ketidakadilan dalam menikmati hasil pembangunan, serta menurunnya kepercayaan rakyat karena pemimpin telah mengkhianati amanat yang diberikan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Praktik korupsi juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan yang disebabkan terhambatnya proses pembangunan nasional baik fisik maupun non fisik yang bisa mengancam keamanan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia serta dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan transparan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang ada baik dari buku, tugas akhir yang dipublikasikan, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, laporan dari sumber resmi dan sumber data lain terkait dengan topik penelitian. Sumber data diambil baik dalam bentuk hard copy maupun sumber digital. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan sesuai dengan sub topik yang dibuat dan dilakukan analisis yang mendalam pada hasil temuan telaah literatur berdasarkan sub topik penelitian. Hasil tersebut digabungkan untuk semua studi dan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Masalah dan Akar Masalah Korupsi di Indonesia

Korupsi banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah & tata kelola belum baik. Seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknum bekerja sama menikmati keuntungan. Korupsi dapat dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*), *kickbacks*, pemberian ilegal (*Illegal gratuities*), pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) dan pertentangan kepentingan (*conflicts of interest*) (ACFE Indonesia Chapter, 2016, 2020). Data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa skor nilai Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia adalah 37 pada skala 0-100 dan Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara dalam persepsi korupsi pada tahun 2020 (Transparency International, 2021).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan kaya akan Sumber Daya Alam, namun tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau

sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan dapat dikaitkan dengan korupsi dimana sumber daya yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru pindah ke tangan oknum yang melakukan korupsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya untuk pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, tetapi karena adanya perilaku korupsi maka hasil pembangunan tidak dapat maksimal diterima masyarakat dan tingkat kemiskinan tidak turun.

Upaya Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan evaluasi faktor internal control serta melakukan restrukturisasi birokrasi untuk mencegah terjadinya korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. Peluang terjadinya fraud dalam organisasi akan tertutup dengan membentuk lingkungan pengawasan yang terkendali terkait dengan regulasi dalam organisasi termasuk di dalamnya internal control sehingga semua aktivitas dapat terkontrol dan tindakan korupsi dapat dicegah (Pane, 2018). Dengan adanya internal control diharapkan mampu menekan terjadinya korupsi karena dengan internal control yang baik maka organisasi dapat berjalan dengan transparan dan diawasi langsung oleh masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah terjadinya fraud.

Korupsi disebabkan oleh tiga determinan yaitu kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan, diskresi pada pembuat keputusan serta tidak adanya (kurangnya) akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi (Sanusi, 2009). Tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemimpin institusi atau lembaga dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi atau dorongan perilaku koruptif seperti besarnya keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan korupsi, potensi risiko yang mungkin terjadi serta adanya kekuatan tawar-menawar antara penyuap dan yang disuap (Sanusi, 2009). Sebagai contoh, seorang Pejabat Pembuat Komitmen/Pimpinan Unit Kerja yang mengelola anggaran satuan kerja dengan jumlah besar, namun gaji dan tunjangan kinerja yang diterima setiap bulan masih dirasa terlalu rendah ditambah dengan kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif serta minimnya sumber daya, maka hal ini akan menjadi faktor pendorong bagi Pejabat Pembuat Komitmen/Pimpinan Unit Kerja untuk menerima suap. Ada kemungkinan pejabat tersebut menyalahgunakan kekuasaan/wewenang ketika memahami risiko tindakan korupsi masih sangat rendah untuk bisa sampai ketahuan hingga mendapatkan sanksi. Karena adanya kemungkinan risiko rendah dalam tindakan koruptif, tetapi bisa mendatangkan keuntungan pribadi/golongan yang banyak, maka hal ini memunculkan motivasi atau dorongan bagi pemimpin/pejabat di unit kerja untuk berperilaku koruptif.

Korupsi yang terjadi di sektor vital (seperti sektor pendidikan dan kesehatan) bisa berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Sebagai contoh, korupsi yang terjadi di sektor kesehatan berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup penduduk, khususnya pasien. Korupsi yang terjadi di sektor pendidikan juga bisa mempengaruhi proses belajar-mengajar yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM Indonesia. Korupsi menjadi musuh bersama yang dapat menghancurkan berbagai sendi kehidupan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dasar dalam melakukan kinerja dan etika publik seperti keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap sesama, menjunjung tinggi nasionalisme untuk persatuan bangsa, demokrasi dan menyelesaikan masalah yang mengutamakan pada musyawarah mufakat, serta perlakuan adil pada seluruh aspek kehidupan. Pemimpin yang melakukan korupsi menunjukkan rendahnya rasa cinta tanah air, sebaliknya perilaku koruptif menunjukkan sikap cinta pada diri sendiri/golongan dengan memperkaya diri/golongan dan merugikan negara serta merusak moral bangsa.

Peran Kepemimpinan Pancasila dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

Kepemimpinan Pancasila merupakan kepemimpinan yang memahami orang secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani mereka dan juga mewujudkan pribadi seutuhnya dengan semua kemungkinan integritas (Lembaga Administrasi Negara, 2021). Dalam mendukung kepemimpinan Pancasila, diperlukan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas, berintegritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan Pancasila berperan penting dalam mengelola kebhinekaan dengan baik serta mempertahankan karakter bangsa dalam melaksanakan proses pembangunan di segala bidang yang dilandasi integritas. Pemimpin yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila mampu mempersatukan bangsa dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan berbagai keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan Pancasila berperan dalam mengawal proses pembangunan yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan sesuai dengan berbagai regulasi sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Implementasi kepemimpinan Pancasila dalam bentuk budaya anti korupsi mampu mendukung penyelenggaraan negara yang bersih demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan Pancasila mengawal proses pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, sangat diperlukan pemimpin nasional berlandaskan ideologi Pancasila yang akan menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemimpin yang mengimplementasikan Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme harus bisa menjadi agen perubahan yang menerapkan budaya anti korupsi sehingga bisa diikuti oleh bawahannya dan membawa organisasi menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan visi dan misinya. Untuk itu, seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat, tanggung jawab moral yang besar serta dari hati nuraninya terus melakukan upaya yang menumbuhkan sikap anti korupsi dan memberi keteladanan yang baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan Pancasila sangat berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan oleh unsur pemerintah yang berbasis kinerja organisasi.

Kepemimpinan Pancasila yang antikorupsi berperan dalam pengambilan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Jiwa Pemimpin yang cinta tanah air dan bangsa harus tertanam kuat demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepemimpinan Pancasila berperan dalam membentuk pola pikir pemimpin sebagai pelayan publik dalam memberikan komitmen pelayanan prima pada masyarakat seperti modernisasi pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan mempermudah prosedur pelayanan sehingga bisa mempercepat pelayanan masyarakat.

Pemimpin nasional yang berpegang kepada Pancasila dihadapkan mampu mengembangkan berbagai strategi dalam berkolaborasi lintas sektor untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa mendatang. Nilai luhur dalam Pancasila menjadi pedoman arah pemecahan persoalan bangsa yang timbul dalam dinamika kehidupan masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan aspek lainnya.

SIMPULAN

Pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, efektif dan efisien. Kepemimpinan Pancasila bisa menjadi benteng pertahanan seorang pemimpin dari berbagai dorongan baik dari dalam (seperti keinginan, hasrat, kehendak mengutamakan kepentingan pribadi) maupun dari luar (seperti dorongan anggota kelompok, adanya kesempatan, lemahnya pengawasan) untuk melakukan tindak korupsi. Seorang Pemimpin yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi teladan dalam perilaku antikorupsi. Sistem akuntabilitas yang benar dalam Pemerintahan akan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan tersebut. Kepemimpinan Pancasila akan memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE Indonesia Chapter. (2016). *Survei Fraud Indonesia 2016*.
ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. In *ACFE Indonesia Chapter*.
Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.

- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial* (Jilid I, C). PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh good corporate governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *Journal of Economic and Banking*, 1(1), 55–60.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas: Pelatihan Kepemimpinan Administrator*. Lembaga Administrasi Negara.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*.
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kecurangan: Survei pada Pemprov Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–104.
- Sofia, I. P. (2016). The Impact of Internal Control and Good Corporate Governance on Fraud Prevention. *2nd International Seminar on Accounting Society, January*, 251–257.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn#>